Peran birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional

Arnus Rachmadhani^{a,1,*}

^aBalai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama, Semarang, Indonesia, 50211

¹arnisuksw@yahoo.co.id

*Correspondent Author

KATAKUNCI

Birokrasi
Kebijakan
Pendidikan Nasional

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berawal dari penting dan mendasarnya persoalan birokrasi pendidikan dalam memperbaiki kebijakan pendidikan nasional, yang tujuannya lebih sebagai investasi masa depan. Sejak era Orde Baru sampai di zaman reformasi saat ini nampaknya birokrasi pendidikan nasional kita masih belum menampakkan pembaruannya. Birokrasi pendidikan kita masih rumit, berputar-putar, sekian kursi sekian meja, yang menghabiskan waktu, uang, tenaga, pikiran, dan perasaan untuk bersabar, hanya untuk mengurus kelulusan, mendaftarkan diri mendapat beasiswa, dan lain sebagainya. Birokrasi pendidikan tidak memberikan proses kemajuan pelayanan pendidikan yang pro perubahan dan mudah dipahami oleh masyarakat sipil, tapi hanya dipahami masyarakat kelas atas, kelas orang kantong tebal. Solusi yang dapat diupayakan untuk mengurangi kesemrawutan birokrasi yang ada tersebut adalah dengan Menempatkan tenaga profesional membentuk dan memfungsikan dewan sekolah, dan Melibatkan peran serta l pada dinas pendidikan, Segera masyarakat luas dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan.

The role of the bureaucracy in implementation of education policy national

The background of the problems in this study originated from the importance and basis of the problems of the education bureaucracy in improving national education policies, which aim more as future investments. Since the New Order era until the current reform era, it seems that our national education bureaucracy has yet to show its reform. Our educational bureaucracy is still complicated, circling, with chairs and tables, which spends time, money, energy, thoughts, and feelings to be patient, just to take care of graduation, register for scholarships, and so on. The education bureaucracy does not provide a progressive process of pro-change education services and is easily understood by civil society, but only understood by the upper class, thick-pocketed class of people. Solutions that can be pursued to reduce the existing bureaucratic clutter are placing professionals in the education office, immediately forming and functioning school boards, and involving the participation of the wider community in overseeing the implementation of education.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

KEYWORDS

Bureaucracy
Policy
National Education

Pendahuluan

Birokrasi (Yusriadi, 2018) hadir sebenarnya dipergunakan untuk mengatur suatu pekerjaan yang beraneka ragam yang menyangkut kepentingan orang banyak agar bisa terlaksana dan melayani semua golongan dengan baik, efektif (Wisman, 2017), dan mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sampai sekarang birokrasi telah menjadi momok bagi manusia modern, yang selalu ingin dihindari dan dijaui.

Kebanyakan pengertian dan penjelasan mengenai birokrasi digambarkan secara negatif. Birokrasi sering dikaitkan dengan keterikatan dan kekakuan orang atau kelompok yang sudah masuk dalam salah satu birokrasi. Maka, hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku birokrat, tetapi sistem atau tindakan lembaga yang memiliki birokrasi tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia bersama India dan Filipina termasuk negara paling tidak efisien (Rahman, 2017) dalam hal birokrasi. Sedangkan, untuk negara paling efisien birokasinya, adalah Singapura dan Hongkong yang selama ini dikenal sebagai pusat keuangan di Asia. Secara umum, hasil survei tersebut menyatakan bahwa birokrasi di beberapa negara Asia telah menjadi pusat kekuasaan dan oleh karenanya harus ada upaya untuk melakukan reformasi (Yusriadi, 2018) secara efektif.

Secara keseluruhan, urutan Indonesia dalam hal efisiensi birokrasi menempati posisi kedua terburuk di Asia setelah India. Berdasarkan standar penilaian 1 hingga 10 (angka 10 adalah berarti yang terburuk), India mengoleksi skor 9,41, diikuti Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Sementara Malaysia berada di urutan keenam terburuk dengan skor 6,97, kemudian Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Sedangkan Singapura yang telah menjalankan birokrasi paling efisien mendapat skor 2,53, diikuti Hongkong (3,49). 2

Dari hasil survei tersebut sebenarnya bisa menjadi awal penilaian kita bagaimana soal penting dan mendasar dari sebuah kekuasaan bangsa Indonesia tersebut kita begitu rendahnya, bagaimana mengurus persoalan birokrasi pendidikan, yang tujuannya lebih sebagai investasi (Rahmadhani & Silvia, 2018) masa depan, nominalnya kurang kelihatan, dan bisa dikatakan samarsamar.

Oleh karena itu dalam makalah ini akan dipaparkan tentang bagaimana peran birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun birokrasi pendidikan yang baik.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Sari & Asmendri, 2018) yang menggunakan pendekatan sejarah (Haryanto, 2017) dalam mengkaji sumber-sumber sejarah pendidikan Islam. Penelitian kualitatif (Prasanti, 2018) ini menggunakan metode pengumpulan data literer dengan sumber data berupa buku dan publikasi ilmiah lain yang relevan. Penelusuran sumber data dimulai dari pemetaan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi (Pratiwi, 2017) adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari mengenal hal-hal atau variabel (Purniawan et al., 2020) yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang dijadikan sumber data bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari tempat penelitian. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Adapun dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Birokrasi

Istilah birokrasi dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiocrat Prancisc Vincent de Gournay yang untuk pertama kali memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem pemerintahan Prusia tahun 1745. Sedangkan konsepsinya pertama kali digagas oleh Max Weber. Dalam pembendaharaan bahasa (Parise et al., 2016) abad ke 18, birokrasi berasal dari kata *bureau* (biro) yang berarti meja tulis, atau suatu tempat yang disana para pejabat bekerja. Istilah ini kemudian mengalami transliterasi sebagaimana istilah demokrasi atau aristokrasi. Sehingga istilah tadi menjadi bagian dalam perbendaharaan istilah politik internasional, yakni *bureaucratie* (Prancis), atau *bureaukratie* (Jerman) yang akhirnya menjadi *buokratie*, atau di Italia disebut *buocrazia*, dan di Inggris disebut *bureaucracy*.

Di dalam Webster's Dictionary, istilah birokrasi (*bureaucracy*) diartikan sebagai, "The administration of government through departments and subdivisions managed by sets of officials following an inflexible routine (administrasi pemerintah melalui beberapa departemen dan beberapa sub bagian yang dikelola oleh sekelompok pejabat untuk mengikuti rutinitas yang kaku)".

Dalam kamus Akademi telah memasukkan kata birokrasi dalam suplemennya pada tahun 1798 yang berarti kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus Bahasa Jerman edisi 1813 mengartikan birokrasi sebagai suatu wewenang atau kekuasaan dimana berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknik bahasa Italia yang terbit tahun 1828 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan. Sedangkan menurut Salamoen mengartikan birokrasi sebagai organisasi pemerintah yang berperan dalam layanan publik, pengawasan publik, serta pengenalan inisiatif dan partisipasi publik.

Birokrasi sebagai lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan (Dewayani & Nugroho, 2021) dalam layanan, pengawasan, serta pengenalan partisipasi publik tersebut sebenarnya merupakan organisasi yang diciptakan agar bisa memaksimalkan hasil secara efisien atas tugas-tugas yang dijalankan. Sebagaimana dinyatakan Max Weber dalam bukunya "Bureaucracy in Modern Society" (1956), bahwa birokrasi adalah organisasi yang bisa memaksimalkan efisiensi dalam administrasi.

Birokrasi menurut Weber harus dirancang dan dibentuk menjadi sebuah organisasi yang menyanggah dan memiliki penampilan sebagai "tipe ideal". Agar birokrasi dapat berfungsi efektif dalam mendukung tugas-tugas di atas maka birokrasi harus memiliki karakteristik (Raestyawati, 2015) sebagai berikut; Para anggota staf secara pribadi menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka, Adanya hirarkhi jabatan yang jelas, Fungsi masing-masing jabatan ditentukan secara tegas, Pejabat diangkat berdasarkan kontrak, Pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional didasarkan dengan ijazah yang diperoleh melalui ujian, Pejabat diberi gaji dan pensiun menurut jenjang kedudukan dalam hirarkhi, Pejabat dapat selalu menempati posnya namun dalam keadaan tertentu dapat diberhentikan, dan Ada struktur karier (Eselon et al., 2015) dan promosi menurut pertimbangan keunggulan (*superior*) dari segi senioritas dan keahlian (*merit*).

Dengan kedelapan hal tersebut birokrasi sebagai organisasi administrasi pemerintah akan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik terutama dalam hal implementasi kebijakan

2. Membangun Birokrasi Pendidikan

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa birokrasi memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan dalam memberikan layanan publik, (Mau et al., 2019) pengawasan

publik, serta pengenalan partisipasi publik. Salah satu layanan dan pengawasan publik yang menjadi tugasnya adalah dalam pengorganisasian administrasi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai organisasi yang kedudukannya sangat penting ini, birokrasi tidak hanya mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, tetapi ia juga merupakan organisasi pelaksanaan kebijakan. Salah satu diantara banyak kebijakan negara adalah kebijakan pendidikan. (Mau et al., 2019)

Di dalam birokrasi pendidikan yang bertugas atau berperan dalam implementasi kebijakan, (Yuliah, 2020) terdapat beberapa jaringan jenjang kekuasaan dan kewenangan yang lengkap dan kompleks, mulai dari kantor Kementerian Pendidikan yang berkedudukan di pusat ibu kota sampai pada kantor Ranting Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan. Dalam hal perumusan kebijakan pendidikan misalnya, Kantor Kementerian Pendidikan yang di dalamnya terdapat beberapa direktorat yang memiliki fungsi dan tugas berbeda, sangat berperan di dalam memberikan input-input informasi kepada DPR serta kepada Presiden di dalam menyusun lahirnya kebijakan pendidikan. Selanjutnya dalam proses implementasi kebijakan pendidikan yang telah diputuskan oleh DPR bersama Presiden tersebut, keberadaan Kementerian Pendidikan sebagai pelaksana utama juga tidak kecil perannya.

Sebagai contoh, kantor Kementerian Pendidikan Nasional pada era pemerintahan Orde Baru dahulu telah memiliki seperangkat organisasional yang luar biasa besarnya. Hal ini dikarenakan, Kementerian Pendidikan dibantu beberapa Kantor Wilayah di masing-masing propinsi. Kantor Wilayah dibantu oleh kantor Departemen di masing-masing kabupaten. Sedangkan Kantor Departemen dibantu oleh Kantor Kecamatan yang jumlahnya ratusan untuk seluruh Indonesia. Lingkungan pemerintahan daerah yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri, juga ada badan yang mengurus pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Kabupaten.

Namun pada era perubahan pasca runtuhnya Orde Baru, otonomi daerah mulai diberlakukan. Kantor wilayah dan Kantor Dinas di bawah jajaran Kementerian Pendidikan Nasional mulai ditiadakan atau dihapuskan. Beberapa urusan pusat sudah diserahkan menjadi urusan daerah, termasuk didalamnya adalah urusan pendidikan. Sehingga urusan pendidikan di daerah hanya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nama Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi dan Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keberadaan perangkat organisasi merupakan alat organisasi yang cukup luar biasa besarnya dalam memberikan peran, baik dalam hal yang menyangkut perumusan maupun dalam implementasi kebijakan. Birokrasi pendidikan ini telah dirancang sedemikian rupa agar bisa menjadi organisasi birokrasi modern. (Wardana & Geovani Meiwanda, 2017)

Birokrasi modern yang ditata dan dirancang menjadi tipe ideal akan memiliki sistem otoritas legal yang mampu mendukung pekerjaan birokrasi. Menurut Max Weber, ada delapan proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal tersebut. Tugas-tugas pejabat diorganisir berdasarkan aturan yang berkesinambungan

Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan beberapa sanksi terhadap penyimpangan yang dilakukan, Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkhis, hak-hak kontrol dan komplain terhadap hak-haknya tersebut diperinci secara lengkap, Aturanaturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal, oleh karenanya manusia terlatih sangat dibutuhkan, Sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi, Pemegang jabatan tidak sesuai dengan jabatannya, Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dalam hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern, dan Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya ialah di dalam sebuah staf administrasi birokratik.

Dewasa ini, banyak birokrasi sebagai organisasi besar dan modern memiliki cirri-ciri universal. Ciri-ciri universal tersebut seperti: (a) mementingkan orientasi tugas, dan pencapaian tujuan, (b) mendapatkan keuntungan atau memenuhi tujuan perencanaan, (c) mendukung efisiensi, koordinasi, dan rasionalitas dalam membuat keputusan, (d) menolak spontanitas, kekacauan, atau eksidentalisme, (e) menekankan sistematisasi dan

akurasi, (f) menunjang verifikasi, kontrol dan formalisasi, serta (g) menolak hedonisme organisasi.

Namun kenyataannya, tidak sedikit keberadaan birokrasi yang adanya menyimpang dari tipe ideal. Beberapa birokrasi yang ada khususnya di beberapa negara berkembang justru telah menjadi momok yang mengerikan. Birokrasi bukanlah menjadi seperti yang diidealkan, tetapi telah merubah menjadi absolut yang memonopoli segala hal. Birokrasi tidak hanya mendominasi kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi juga telah ikut terlibat dalam kegiatan politik masyarakat secara keseluruhan. Bahkan menurut hasil penelitian Rainer Rohdewohld, birokrasi di Indonesia pada era Orde Baru telah menguasai dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan (initiating), pengarahan (directing), dan penerapan (implementing) kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk dalam urusan-urusan privat sekalipun, birokrasi ikut terlibat.

Melihat keterlibatan birokrasi yang demikian besarnya dalam segenap kehidupan masyarakat khususnya yang terjadi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, maka menurut Gaetano Mosca telah terjadi apa yang disebut dengan "absolutisme birokrasi". Dengan kata lain, fenomena demikian bisa juga disebut sebagai "keserakahan birokrasi" (Hadi, 2016). Senada dengan hal itu, Darmaningtiyas juga melontarkan kritik yang cukup pedas terhadap sistem pendidikan Indonesia yang dinilainya tidak mampu membawa masyarakat untuk bisa cerdas. Karena menurutnya, pendidikan di Indonesia sering diarahkan sebagai alat propaganda untuk membela dan menguatkan struktur kekuasaan yang ada dengan alasan nasionalisme, persatuan, penggalangan kekuatan bangsa.

Dalam kasus Indonesia, keadaan birokrasi pendidikan sebenarnya tidak terlepas dari keadaan birokrasi negara pada umumnya. Sebagaimana hasil penelitian Rainer Rohdewohld di atas, bahwa birokrasi di Indonesia telah menguasai dan mengurus segenap hal kehidupan masyarakat termasuk dalam urusan privat sekalipun; maka birokrasi pendidikan sebagai organisasi yang mendukung dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan juga tidak menyimpang jauh dari itu. Ia telah berperilaku serakah dalam urusan-urusan pendidikan.

Pada era Orde Baru banyak terjadi keganjilan-keganjilan dari perilaku birokrasi pendidikan tersebut. Misalnya dalam urusan potong memotong gaji guru, birokrasi adalah ahlinya sehingga sering didengar ungkapan "gaji guru banyak disunat". Dalam hal ini mengirim buku paket yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, birokrasi juga ahliya. Soal "paket komputer" yang ditunggu-tunggu sekolah ternyata yang datang hanya paket komputer bekas dengan harga di atas harga baru baru tiga kali lipat.

Melihat kondisi demikian, sehingga keberadaan birokrasi pendidikan mulai dari Kancam Diknas, Kandep Diknas, Kanwil Diknas, sampai ke atas, keberadaannya lebih banyak merusak daripada membangun pendidikan. Pada saat itu, keberadaan kantorkantor tersebut lebih banyak "mengerogoti" daripada "menyumbang" pertumbuhan pendidikan. Oleh karenanya, Amin Rais pernah menyebut birokrasi Indonesia adalah "birokrasi predator". (Paskarina, 2017)

Dari hal itu dapat kita lihat bahwa sistem pendidikan pada era Orde Baru tersebut telah menunjukkan kegagalannya dengan melahirkan generasi yang tertekan sehingga menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri terutama generasi muda yang diwujudkan oleh perlawanan mahasiswa.

Dalam semua kegiatan implementasi kebijakan, menurut Charles O. Jones selalu ada dua aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu: (a) Beberapa orang di luar para birokrat yang mungkin

terlibat dalam aktifitas-aktifitas implementasi; dan (b) para birokrat sendiri yang terlibat dalam aktifitas fungsional, di samping tugas-tugas implementasi.

Dua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan implementasi kebijakan pendidikan adalah pihak pertama merupakan para pengguna (constituents) serta pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok kepentingan (interest groups). Seperti para pengusaha, LSM, NU, Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Kelompok-kelompok ini pada umumnya berkepentingan terhadap proses implementasi kebijakan pendidikan agar tidak merugikan mereka. Bahkan kalau bisa mereka mendapat keuntungan dari kegiatan implementasi tadi.

Salah satu contoh konkrit adanya kepentingan beberapa kelompok tersebut adalah pada waktu implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yakni mereka berusaha mempengaruhi birokrasi pendidikan dalam hal izin pendirian sekolah, pengadaan bantuan buku, pengadaan bantuan laboratorium, pengangkatan guru, dan penilaian akreditasi sekolah. Adapun kepentingan bagi pengusaha dalam hal ini adalah diperolehnya lulusan-lulusan terbaik dari lembaga sekolah atau perguruan tinggi bagi perusahaannya.

Sedangkan pihak kedua yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah para pimpinan beserta staf birokrasi pendidikan. Mereka semua inilah sebenarnya pelaku riil dalam implementasi kebijakan pendidikan. Mereka tergolong pelaku depan panggung (fronts stages), sedangkan para pengguna dan kelompok kepentingan adalah pelaku panggung belakang (back stages).

Sebagai pelaku depan dan pelaku utama dalam implementasi kebijakan pendidikan, birokrasi pendidikan membutuhkan perangkat organisasional dan sistem kerja yang baik agar ia bisa berperan baik sehingga bisa menghindari adanya masalah dan penyimpangan. Beberapa penyebab timbulnya masalah dan penyimpangan adalah :

Adanya over lapping tujuan-tujuan kebijakan yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya kesalah-fahaman, kekacauan, atau disebabkan oleh konflik nilai. Partisipasi aktor yang begitu banyak dengan otoritas yang tumpang tindih, Ketahanan para pelaku implementasi (implementer), ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan pelaksanaan implementasi kebijakan.

3. Peran Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Untuk menjalankan peran fungsionalnya sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan pendidikan sekaligus dalam rangka mengeliminasi adanya masalah dan penyimpangan sebagaimana disebut di atas, maka birokrasi pendidikan perlu melakukan upaya baru yang dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah Model Implementasi Adaptif (Taufan et al., 2019) (Adaptive Implementation Model).

Model Implementasi Adaptif (MIA) adalah model penetapan suatu proses yang memungkinkan kebijakan dapat dimodifikasikan, dispesifikasikan, dan direvisi. MIA ini merupakan model yang muncul disebabkan oleh empat faktor pendorong. Empat faktor pendorong munculnya MIA tersebut adalah :

Beberapa kompleksitas personal dan birokrasi yang tidak dapat dihindarkan di dalam proses implementasi dengan menekankan kepada batasan mengenai situasi yang dianggap sebagai variabel yang berguna dalam merencanakan strategi-strategi implementasi. (Marlizar, 2018)

Studi-studi mengenai peranan penting kebijakan yang merubah organisasi; Studi-studi mengenai cara dimana inovasi-inovasi didapatkan kembali setelah memperkuat kepentingan adaptasi dari proses implementasi;

Pengaruh yang terus menerus dari para ahli teori organisasi yang mengevaluasi model-model organisasi yang bersifat hierarkhi, (Hartanto, 2020) menekankan pada desentralisasi refleksibel dan mempelajari organisasi adaptif.

Model Implementasi Adaptif sebagai salah satu hasil temuan para ahli ilmu sosial dalam

mendorong agar kegiatan implementasi kebijakan pendidikan lebih berhasil, sebenarnya memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu:

Banyak menghindari prinsip-prinsip paradigma design-eksperimen. Dapat mengubah pokok-pokok pikiran yang ditetapkan sebelumnya, karena adanya orientasi dari para pendukung, misalnya treatment yang distandarkan untuk kelompok-kelompok yang menjadi target

Spesifikasi tujuan lebih merupakan “masalah” dari pada suatu “nilai”. Sebaliknya perubahan dalam kebijakan organisasi yang diimplementasikan lebih merupakan suatu “nilai” daripada suatu “masalah”

Penerapan dari model ini dalam implementasi kebijakan pendidikan, maka seorang pejabat birokrasi pendidikan lebih memiliki fleksibilitas dalam memahami aturan, sikap serta target-target sasaran yang dicapai. Lebih-lebih manakala menghadapi kondisi lokal yang sangat pluralistik, seorang birokrat tidak akan bisa bekerja optimal kalau hanya mengandalkan aturan kaku.

Contoh yang terjadi adalah ketika penerapan Kurikulum Muatan Lokal (Sugianti et al., 2020) untuk Sekolah Dasar yang dimulai sejak tahun 1993 dengan diawali adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 25 Februari 1993 dengan SK Nomor: 060/U/1993, ternyata dirasakan belum optimal pelaksanaannya. Banyaknya kendala dilapangan yang dilatarbelakangi oleh kekuatan dalam praktek implelementasi di satu sisi, serta adanya keberagaman kapasitas intelektual pada birokrat pelaksana disertai kondisi geografis serta kondisi kultural yang sangat plural disisi lain menyebabkan penerapan KML menjadi kurang optimal.

Tentu saja menyangkut penerapan kebijakan Kurikulum Muatan Lokal adalah salah satu kasus implementasi kebijakan pendidikan, sedangkan contoh lain sebenarnya masih banyak lagi yang kesemuanya hampir berjalan kurang optimal yang disebabkan antara lain oleh kondisi internal birokrasi pendidikan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut; Terdapat ilmuwan Barat beranggapan kedudukan umat Islam dan ilmuwan sainsnya hanya sekedar memindahkan dari pencapaian sains Yunani dan menafikan sejarah sains dan teknologi Islam yang pernah mengalami kejayaan panjang dengan segala prestasinya.

Dari pemaparan tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; Sejak era Orde Baru sampai di zaman reformasi saat ini nampaknya birokrasi pendidikan nasional kita masih belum menampakkan pembaruannya. Birokrasi pendidikan kita masih rumit, berputar-putar, sekian kursi sekian meja, yang menghabiskan waktu, uang, tenaga, pikiran, dan perasaan untuk bersabar, hanya untuk mengurus kelulusan, mendaftarkan diri mendapat beasiswa, dan lain sebagainya. Birokrasi pendidikan tidak memberikan proses kemajuan pelayanan pendidikan yang pro perubahan dan mudah dipahami oleh masyarakat sipil, tapi hanya dipahami masyarakat kelas atas, kelas orang kantong tebal. Solusi yang dapat diupayakan untuk mengurangi kesemrawutan birokrasi yang ada tersebut adalah dengan Menempatkan tenaga profesional pada dinas pendidikan, Segera membentuk dan memfungsikan dewan sekolah, dan Melibatkan peran serta masyarakat luas dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan.

Dalam hal ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk diberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan makalah ini. Semoga makalah ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan diskusi bersama untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Dewayani, I. K., & Nugroho, R. A. (2021). Government Process Reengineering in the Implementation of Electronic Welfare System. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 86. <https://doi.org/10.20961/sp.v16i1.45902>
- Eselon, P., Dan, I. I. I., Berbasis, I. V, Di, K., & Ibrahim, I. (2015). *MODEL JENJANG KARIR JABATAN LEVEL ADMINISTRATOR DAN. 4.*
- Hadi, K. (2016). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 20. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/512/320>
- Hartanto, D. (2020). MODEL HIERARKI KOMUNIKASI ORGANISASI BADAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (BARESKRIM POLRI). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 4(2), 111. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v4i2.8480>
- Haryanto, S. (2017). PENDEKATAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 127–135. <https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.927>
- Marlizar. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STRATEGI YANG EFEKTIF DALAM INDUSTRI BANK SYARIAH Marlizar (Dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Aceh). *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (JIMMA)*, 8(1), 92–111.
- Mau, M., Tahara, T., Munizu, M., Yusniar, Y., & Marsudi, M. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.46891/kainawa.1.2019.87-99>
- Parise, C. K., Pinto, F., Aravéquia, J. A., Ribeiro, B. Z., Dutra, L. M. M., Loureiro, R. N. A., Abreu, E. X. de, Silva, M. V. da, Reboita, M. S., Teodoro, T. A., Assunção, V., Fecilcam, D. G., Uem, F., Estadual, U., Silveira, L., & Cruz, A. P. S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 11(9), 141–156. http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS-RJ/RBG/RBG1995v57_n1.pdf%0Ahttps://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/234295
- Paskarina, C. (2017). Menundukkan Birokrasi: Melacak Pertarungan Kuasa Dibalik Wacana Reformasi Birokrasi. *CosmoGov*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11799>
- Prasanti, D. (2018). Model - Model Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
- Purniawan, Y., Mas'ud, I., & Wulandari, N. (2020). PENERAPAN METODE VARIABLE COSTING DALAM PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL. *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER*, 17(2), 68. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i2.9981>
- Raestyawati, U. (2015). KARAKTERISTIK BIROKRASI LOKAL (Aristokrasi Jabatan Kepala Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 21–39. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.71>
- Rahmadhani, R., & Silvia, A. (2018). ANALISIS PENGARUH INVESTASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Ecogen*, 1(2), 327. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i2.4753>
- Rahman, A. (2017). Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87–103.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sugianti, S., Santi, S., & Rositah, R. (2020). Analisis kebijakan pendidikan terkait penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran. *Mappesona*, 2(1).
- Taufan, J., Fitri, R., & Rafmateti, R. (2019). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif bagi Siswa Tunarungu di SLB Negeri 2 Padang Melalui Penugasan Dosen di Sekolah. *Jurnal Pendidikan*

-
- Kebutuhan Khusus*, 3(2), 31. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v3i2.546>
- Wardana, D., & Geovani Meiwanda. (2017). Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat. *Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(April), 334.
- Wisman, Y. (2017). KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Nomosleca*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2039>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>